

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang kehidupannya selalu berinteraksi baik dalam kehidupan sosial maupun politik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah Satu topik politik yang paling banyak menjadi perbincangan adalah perempuan dalam politik. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, akan tetapi dunia internasional pun membahas ini.

Tidak dapat disangkal bahwa posisi kaum perempuan dan laki-laki masih mengalami diskriminasi baik dalam sosial, ekonomi, maupun politik. Politik Indonesia misalnya yang masih sarat dengan diskriminasi gender. Harus diakui bahwa, banyak perempuan di Indonesia masih buta terhadap politik. Politik selama ini selalu identik dengan dunia laki-laki, sesuatu yang kotor, dan tidak pantas dimasuki oleh kaum perempuan. Dari pandangan feminisme, politik identik dengan sesuatu yang aneh karena berhubungan dengan kekuasaan, kompetisi yang sangat berbanding terbalik dengan citra perempuan yang mengutamakan perdamaian dan harmoni.

Sebenarnya sudah cukup banyak landasan hukum yang dibuat baik berupa Undang-Undang, aturan, maupun konvensi yang membahas tentang peranan atau pernyataan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang. Misalnya CEDAW (*Convention on the Elimination of Form Discrimination Against Women*), INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam

Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD.

Selain itu, dalam sebuah negara, perempuan merupakan salah satu elemen penting dalam sebuah negara. Maka tidak heran jika sering mendengar sebuah ucapan “ dibalik laki-laki sukses, ada wanita hebat dibelakangnya”, yang artinya perempuan juga memiliki peran. Pemberdayaan terhadap politik perempuan merupakan sebuah solusi yang serius agar perempuan dapat memfungsikan dirinya dalam kehidupan politik berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam bidang yang mampu dilakukannya (Daulay, 2007).

Keberhasilan politik di suatu negara bukan hanya diukur dengan adanya pemilu dan lembaga-lembaga pemerintahan saja, akan tetapi keterwakilan perempuan dalam politik juga menjadi hal yang sangat penting. Akan tetapi pada kenyataannya di Indonesia, perempuan hanya menjadi objek politik sedangkan keterwakilan politik dilakukan oleh kaum laki-laki. Sistem politik yang berlaku saat ini menempatkan perempuan hanya sebagai orang kedua (*second person*) sehingga nasib perempuan tidak pernah mengalami perubahan yang signifikan (Wahyudi, 2018).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi awal di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dairi, dan website dairikab.go.id, ditemukan data sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perolehan Suara Pemilu Legislatif Periode 2014-2019 dan 2019-2024

N O	Nama Partai	Periode 2014-2019		Perolehan suara	Periode 2019-2024		Perolehan suara
		Laki- Laki	Perempuan		Laki- laki	Perempuan	
1	NASDEM	24	11	19.912	22	13	20.355
2	PKB	12	5	2.451	4	3	3.906
3	PKS	25	7	3.759	6	4	2.624
4	PDIP	24	8	19.160	22	13	26.074
5	GOLKAR	25	10	49.413	22	13	37.030
6	GERINDRA	27	8	19.038	18	14	10.942
7	DEMOKRAT	19	7	8.070	19	15	20.489
8	PAN	21	10	13.815	15	9	6.410
9	PPP	2	2	1.001	3	2	148
10	HANURA	21	10	17.614	19	11	18.324
11	PBB	8	4	180	-	-	
12	PKPI	21	9	3.660	-	-	
13	PERINDO	-	-	-	9	5	7.527
14	BERKARYA	-	-	-	3	2	343
15	PSI	-	-	-	12	9	6.150
Jumlah		229	91	158.073	174	113	158.273

Sumber: KPU Dairi, dairikab.go.id. 2021

Jumlah daftar calon tetap (DCT) DPRD periode 2014-2019 adalah 320 dan jumlah perempuan yang berhasil duduk adalah sebanyak 1 orang dari total 35 kursi yang diperebutkan. Sedangkan pada periode 2019-2024 jumlah daftar calon tetap (DCT) adalah sebanyak 287 orang. Pada periode ini, jumlah perempuan yang

berhasil duduk di kursi legislatif adalah sebanyak 2 orang dari total kursi yang diperebutkan sebanyak 35. Ini menandakan adanya peningkatan walau kecil. Namun, angka ini masih jauh dari yang diharapkan karena yang terpenuhi hanyalah kuota representasi 30% perempuan dalam pencalonan saja sedangkan persentase yang duduk di legislatif hanya sekitar 0,6% saja. Angka yang cukup jauh bila dibandingkan dengan persentase yang mencalonkan.

Oleh sebab itu, saya tertarik untuk meneliti apa sebab dan mengapa perempuan baik yang duduk di kursi legislatif maupun yang mencalonkan diri dalam pemilu legislatif periode 2019-2021 memilih untuk terjun kedalam dunia politik ini. Penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada bagaimana keterwakilan perempuan dalam politik di DPRD Dairi serta faktor yang menjadi penghambat dalam berpartisipasi dalam politik di DPRD Kabupaten Dairi. Akan dibutuhkan juga pernyataan dari beberapa sumber sebagai pembanding untuk menemukan jawaban yang netral dan tidak memihak siapapun agar hasil dari penelitian yang akan dilakukan bersifat rasional dan diharapkan memberikan ilmu yang bermanfaat.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis berkaitan dengan perempuan dalam politik di Kabupaten Dairi dengan studi kasus DPRD Kabupaten Dairi periode 2019-2024.

1.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini efektif dan efisien, maka peneliti membuat pembatasan masalah yang akan diteliti, untuk mempertegas sasaran yang akan dicapai. Maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah Perempuan Dalam Politik (Studi Anggota Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi Periode 2019-2024).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian di atas maka masalah dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1 Apa yang menjadi pertimbangan bagi perempuan terhadap keterwakilan dalam politik ?
- 2 Apa faktor penghambat bagi perempuan untuk terlibat dalam politik dan duduk di DPRD Kabupaten Dairi periode 2019-2024 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa yang menjadi pertimbangan perempuan terhadap keterwakilan dalam politik
- 2 Untuk mendeskripsikan faktor penghambat bagi perempuan untuk terlibat dalam politik dan duduk di DPRD Kabupaten Dairi periode 2019-2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- 1 Secara akademis, hasil penelitian ini sebagai salah satu kajian ilmu pemerintahan khususnya di DPRD dan anggota legislatif perempuan dalam aspek keterwakilan perempuan dalam politik, strategi dan permasalahannya di Kabupaten Dairi.
- 2 Secara praktis, hasil penelitian ini sebagai evaluasi strategi yang dapat dipilih dalam pemberdayaan perempuan dan memberikan masukan kepada legislatif untuk meningkatkan kuota keterwakilan perempuan dalam politik, serta dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

